

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Teori Indeks Pembangunan Manusia**

Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, bukan sebagai alat dari pembangunan. Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi masyarakat.

*United Nation Development Programme (UNDP)* menyatakan bahwa tujuan dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif sebagai proses dari perluasan pilihan tersebut.

Pembangunan manusia ditujukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Hal ini dikarenakan keberhasilan pembangunan seringkali dilihat dari mutu sumber daya manusianya. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah berupaya untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia di wilayahnya dengan aspek pendidikan, aspek kesehatan, dan aspek ekonomi sehingga peran

masyarakat dengan sendirinya akan meningkat. Paradigma pembangunan manusia terdiri dari 4 (empat) komponen utama (UNDP, 1995), yaitu:

a. Produktivitas

Mankiw (2006) menjelaskan bahwa standar hidup di berbagai negara dikaitkan dengan produktivitas. Produktivitas yang tinggi dari suatu negara dapat membuat masyarakatnya menikmati standar hidup yang tinggi karena tingkat produktivitas menentukan tingkat pertumbuhan rata-rata masyarakat. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi juga merupakan salah satu dari jenis pembangunan manusia.

b. Ekuitas

Masyarakat harus memiliki akses dalam memperoleh kesempatan yang adil. Semua hambatan terhadap peluang ekonomi dan politik harus dihapuskan agar masyarakat dapat ikut serta dan memperoleh manfaat dari kesempatan ini.

c. Kestinambungan

Kesempatan yang ada harus berkesinambungan hingga generasi di masa mendatang sehingga generasi di masa datang dapat memperoleh akses kesempatan yang sama sehingga semua sumberdaya fisik dan lingkungan harus diperbaharui.

d. Pemberdayaan

Dalam proses pengambilan keputusan, masyarakat harus berpartisipasi secara penuh untuk menentukan langkah kehidupan

mereka. Keberhasilan suatu negara atau wilayah dalam bidang pembangunan diukur dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index (HDI)*. IPM diperkenalkan oleh UNDP pertama kali pada tahun 1990 dan secara berkala dipublikasikan dalam laporan tahunan *Human Development Report (HDR)*. Terdapat tiga dimensi dasar yang membentuk IPM, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak.

Dimensi umur panjang dan hidup sehat merupakan dimensi dari indeks kesehatan yang menggunakan indikator angka harapan hidup saat lahir. BPS mendefinisikannya sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seorang sejak lahir.

Dimensi pengetahuan merupakan dimensi dari indeks pendidikan yang menggunakan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai pendidikan formal yang digunakan penduduk dalam jumlah tahun. Cakupan penduduk yang dihitung adalah usia 25 tahun ke atas. Angka harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak umur tertentu di masa mendatang. Angka harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk usia 7 tahun ke atas. Dimensi pendidikan ini digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem

pendidikan yang merupakan indikator dari Indeks Pembangunan Manusia.

Dimensi standar hidup layak merupakan dimensi dari indeks pengeluaran yang menggunakan indikator pengeluaran per kapita disesuaikan. Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Semakin tinggi paritas daya beli masyarakat di suatu wilayah, maka semakin tinggi standar hidup layak di wilayah tersebut.

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator penting dalam mengukur keberhasilan dalam membangun mutu hidup masyarakat di suatu wilayah yang digunakan untuk menentukan level pembangunan di wilayah tersebut. Selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

## **2. Teori Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia**

Terdapat beberapa teori dalam pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia wilayah, yaitu:

### **a. Teori Pertumbuhan Ekonomi**

Teori pertumbuhan ekonomi merupakan sasaran utama proses pembangunan manusia. Pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan ketersediaan lapangan pekerjaan yang berimbang pada meningkatnya produktivitas masyarakat di suatu wilayah.

Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan kapasitas jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya (Todaro dan Smith, 2003). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan mampu memberikan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakatnya. Hal tersebut membuktikan bahwa pendapatan masyarakat di suatu wilayah mengalami peningkatan. Suparmoko (2009) kemudian menyatakan bahwa pengukuran pertumbuhan ekonomi yang tepat adalah melalui pendapatan per kapita yang menuntut adanya kenaikan pendapatan nasional.

b. Teori Pertumbuhan Klasik

Ahli ekonomi klasik mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, serta tingkat teknologi yang digunakan. Para ahli ekonomi menitikberatkan perhatiannya pada pengaruh pertambahan penduduk kepada pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan pertambahan penduduk yang tinggi akan mengurangi keuntungan. Hal ini dikarenakan setiap tambahan penduduk akan mengurangi tingkat kegiatan ekonomi karena produktivitas menjadi negatif yang mengakibatkan kemakmuran masyarakat menurun kembali dan tingkat perkembangan ekonomi

sangat rendah. Keadaan seperti ini disebut dengan keadaan tidak berkembang dan pekerja hanya mencapai tingkat cukup hidup.

c. Teori Schumpeter

Schumpeter menjelaskan pentingnya peran pengusaha dalam pertumbuhan ekonomi. Dalam kondisi perekonomian apapun, pengusaha akan menciptakan inovasi untuk mendapatkan keuntungan. Hal tersebut akan meninggikan tingkat kegiatan ekonomi negara.

d. Teori Pertumbuhan Neo-Klasik

Teori pertumbuhan ekonomi neo-klasik muncul pada pertengahan tahun 1950an. Teori ini merupakan analisis yang didasarkan pada pandangan ahli ekonomi klasik yaitu Solow dan kemudian dikembangkan oleh Edmund Philips, Harry Johson, dan J.E Meade. Solow dan Denison menyimpulkan bahwa faktor terpenting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi bukanlah modal dan tenaga kerja, melainkan teknologi dan penambahan kemahiran dan kepakaran tenaga kerja.

e. Teori Pertumbuhan Baru: Pertumbuhan Endogen

Teori pertumbuhan endogen pertama kali dikemukakan oleh Paul M Romer yang mengkaji imbasan teknologi yang mungkin terdapat dalam proses industrialisasi. Perilaku aliran modal dari negara-negara berkembang memicu konsep pertumbuhan endogen atau yang dikenal teori pertumbuhan baru.

Teori pertumbuhan baru menjelaskan proses produksi dan kekuatan yang bukan dari luar sistem dengan melihat pertumbuhan pendapatan nasional yang persisten. Teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya tabungan dan investasi modal manusia guna mempercepat pertumbuhan. Potensi pengembalian yang tinggi oleh negara berkembang berkurang dengan cepat dikarenakan rendahnya investasi komplementer dalam sumber daya manusia (pendidikan), infrastruktur, atau riset dan pengembangan. (Todaro dan Smith, 2003). Teori pertumbuhan baru menjelaskan hasil endogen dari investasi negara dalam sumber daya manusia dan industri padat pengetahuan berupa teknologi. Teori ini mendorong peran aktif dalam merangsang pembangunan ekonomi melalui penggunaan teknologi berupa industri perangkat lunak dan telekomunikasi.

### **3. Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia**

Dalam Indeks Pembangunan Manusia, terdapat tiga indeks yang menjadi komponen perhitungan.

#### **a. Dimensi Kesehatan**

Dimensi kesehatan dihitung dengan melihat angka harapan hidup saat lahir dalam satuan tahun dengan rumus:

$$I_{\text{kesehatan}} = \frac{\text{---}}{\text{---}}$$

Keterangan:

I = Indeks

AHH = Angka Harapan Hidup

b. Dimensi Pendidikan

Dimensi pendidikan dihitung dengan memasukkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah dengan rumus:

$$I_{\text{HLS}} = \frac{\text{---}}{\text{---}}$$

$$I_{\text{RLS}} = \frac{\text{---}}{\text{---}}$$

$$I_{\text{pendidikan}} = \frac{\text{---}}{\text{---}}$$

Keterangan:

HLS = Harapan Lama Sekolah

RLS = Rata-rata Lama Sekolah

c. Dimensi Pengeluaran

Dimensi pengeluaran dihitung dengan menggunakan pengeluaran perkapita disesuaikan.

$$I_{\text{pengeluaran}} = \frac{\text{---}}{\text{---}}$$



d. Indeks Pembangunan Manusia

IPM dihitung sebagai rata-rata geometric dari ketiga indeks komponennya dan dinyatakan dalam bentuk poin.

$$\text{IPM} = \frac{\text{---}}{\text{---}} \times 100$$

#### 4. Belanja Pemerintah

Belanja pemerintah merupakan pengeluaran untuk barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah. Sukirno (2000) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah merupakan sebuah kebijakan fiskal., yakni tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian di suatu daerah setiap tahun yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk skala regional dan Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) untuk skala nasional. Kebijakan fiskal ini bertujuan untuk menstabilkan harga, tingkat output, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Menurut Mangkoesobroto (1999), kebijakan pemerintah dicerminkan melalui belanja pemerintah. Ketika pemerintah menetapkan kebijakan pembelian barang dan jasa, belanja pemerintah mencerminkan biaya pemerintah dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

Model pembangunan tentang perkembangan belanja pemerintah dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan belanja pemerintah dengan tahap pembangunan ekonomi yang diklasifikasikan menjadi tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal,

pemerintah harus menyediakan prasarana seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan sebagainya. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, pemerintah tetap meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas. Pada tahap ini, akan banyak terdapat masalah akibat investasi pihak swasta. Pemerintah turun tangan untuk mengatur dan mengurangi dampak negatif dan melindungi buruh lemah agar dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Pada tahap lanjut, Rostow menyatakan bahwa aktivitas pemerintah beralih dari penyedia prasarana ke pengeluaran untuk aktivitas sosial.

Menurut Dumairy (1999) ada empat peran yang dimiliki pemerintah, yaitu:

a. Alokatif

Peran alokatif merupakan peran pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi yang sudah ada agar lebih optimal pemanfaatannya sehingga mendukung produksi yang efisien.

b. Distributif

Peran distributif merupakan peran pemerintah untuk mendistribusikan sumber daya, kesempatan, dan hasil ekonomi secara adil.

c. Stabilitatif

Peran stabilitatif merupakan peran pemerintah untuk memelihara stabilitas ekonomi dan memulihkan jika dalam keadaan tidak seimbang.

d. Dinamisatif

Peran dinamisatif merupakan peran pemerintah dalam menggerakkan proses pembangunan ekonomi agar mengalami kemajuan.

## **5. Indeks Pemberdayaan Gender**

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) didefinisikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai ukuran agregat yang dapat digunakan untuk mempelajari sejauh mana fungsi peranan perempuan dalam proses pengambilan keputusan serta kontribusinya di dalam aspek ekonomi dan sosial. IDG menggambarkan keterlibatan perempuan di bidang politik dengan melihat indikator persentase perempuan di parlemen, keterlibatan perempuan di dalam posisi strategis dunia kerja melalui persentase perempuan sebagai manajer, profesional, administrasi dan teknisi, serta keterlibatan perempuan sebagai penyumbang pendapatan rumah tangga melalui persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja.

Untuk mengetahui kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga, dapat dilihat dari hal berikut:

- a. Seberapa besar partisipasi aktif perempuan dalam perumusan dan pengambilan keputusan atau perencanaan maupun dalam kegiatan baik dalam domestik maupun publik.
- b. Seberapa besar manfaat yang diperoleh perempuan dari pelaksanaan kegiatan baik sebagai pelaku atau pemanfaat.
- c. Seberapa besar akses dan kontrol dan penguasaan perempuan dalam sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang menjadi aset keluarga, seperti hak waris, hak pendidikan dan pengetahuan, jaminan kesehatan, dan sebagainya (Demartoto, 2005).

## **6. Infrastruktur**

BPS menyatakan bahwa infrastruktur merupakan fasilitas yang dapat memudahkan hubungan komunikasi dan proses mobilisasi masyarakat dalam menunjang distribusi barang dan jasa sehingga berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, terutama pada daerah yang sulit dijangkau. Infrastruktur dibagi menjadi dua jenis, yaitu berdasarkan transportasi dan energi. Infrastruktur transportasi berkaitan dengan jangkauan dan lokasi dalam proses penyampaian barang dan jasa. Infrastruktur energi berkaitan dengan konsumsi listrik dan konsumsi air bersih dalam masyarakat.

## **7. Hubungan Antar Variabel**

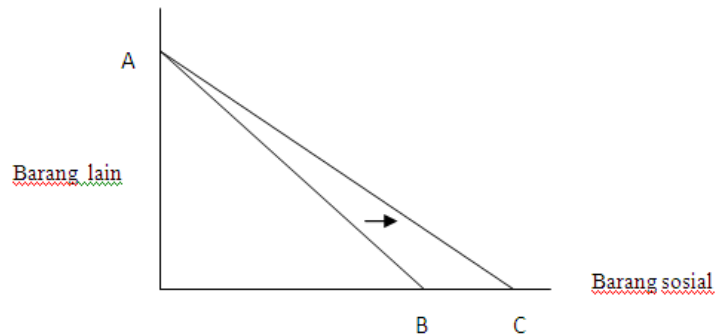
### **a. Hubungan Belanja Pemerintah di Bidang Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia**

Mekanisme pokok dalam pengembangan keahlian dan pengetahuan manusia adalah sistem pendidikan formal (Todaro, 1994). *United Nations* menyatakan bahwa pendidikan adalah hal mendasar dalam meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan menjamin kemajuan sosial dan ekonomi. Bangsa-bangsa miskin telah menginvestasikan dana yang besar untuk investasi di bidang pendidikan karena tenaga ahli yang dapat membaca dan menulis dianggap lebih dapat memahami produk dan material yang terus berkembang.

Modal manusia yang berpendidikan akan menghasilkan pemimpin yang baik dalam mengemban tugas besar pembangunan sehingga belanja pemerintah di bidang pendidikan akan memperluas pilihan masyarakat dalam perluasan kesempatan bersekolah. Dengan adanya perluasan kesempatan sekolah, masyarakat akan memiliki perluasan pilihan dalam penyediaan kesempatan kerja, penciptaan kelompok pimpinan terdidik, pengetahuan yang lebih baik, dan pelatihan dalam rangka menghilangkan buta huruf. Perluasan pilihan masyarakat dengan adanya pengeluaran pemerintah dijelaskan dalam gambar berikut:

**Gambar 2.1**

Perubahan garis anggaran akibat adanya pengeluaran



Sumber: Sukirno, 2008

Gambar di atas menjelaskan kenaikan belanja pemerintah untuk sosial, contohnya subsidi sekolah, yang mengakibatkan garis anggaran AB bergeser menjadi AC. Dalam hal ini, belanja pemerintah di bidang pendidikan memperluas peluang pilihan masyarakat yang akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.

#### **b. Hubungan Belanja Pemerintah di Bidang Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia**

Kesehatan merupakan investasi yang berkaitan dengan pembangunan. Kesehatan merupakan faktor penting agar seseorang bisa hadir dalam pendidikan. Harapan hidup yang panjang akan meningkatkan pengembalian atas investasi dalam pendidikan. Fenomena kesehatan menjadi variabel yang nantinya dapat dianggap sebagai faktor produksi untuk menambah nilai barang dan jasa, atau suatu sasaran dari tujuan yang ingin dicapai individu. Oleh karena

itu, belanja pemerintah di bidang kesehatan memiliki pengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Undang-undang Republik Indonesia menyatakan bahwa dana untuk kesehatan yang diatur pada UU No 36 tahun 2009 menyebutkan bahwa besar anggaran kesehatan pemerintah dialokasikan minimal 5 persen dari APBN di luar gaji.

**c. Hubungan Indeks Pemberdayaan Gender terhadap Indeks Pembangunan Manusia**

Menurut BPS, hubungan capaian pembangunan manusia dan pemberdayaan gender dilakukan dengan analisis kuadran. Kuadran I menyatakan bahwa ketika IPM di atas rata-rata nasional dan ketimpangan gender tinggi. Kuadran II menyatakan IPM di bawah rata-rata nasional dan ketimpangan gender tinggi. Kuadran III menyatakan IPM di bawah rata-rata nasional dan ketimpangan gender rendah, dan kuadran IV menyatakan IPM di atas rata-rata nasional dan ketimpangan gender rendah. Hal ini menjadikan kategori ini sebagai kondisi yang ideal di mana Indeks Pemberdayaan Gender berhubungan positif dengan Indeks Pembangunan Manusia karena capaian pembangunan manusia secara umum dengan mempertimbangkan gender terus meningkat dari tahun ke tahun.

#### **d. Hubungan Infrastruktur terhadap Indeks Pembangunan Manusia**

World Bank (1994) menyatakan konsensus perusahaan bahwa peningkatan akses infrastruktur seperti energi, air, dan transportasi secara langsung menguntungkan individu dan rumah tangga, komunitas, dan perusahaan. Hal tersebut juga menguntungkan individu dan rumah tangga dengan mengurangi biaya dan menaikkan kualitas kesehatan dan pendidikan yang akan membantu mengembangkan pendidikan dan kesehatan individu, yang akhirnya meningkatkan pembangunan manusia di tingkat lokal maupun nasional.

Jacoby (2002) menyatakan bahwa peningkatan infrastruktur secara langsung menguntungkan perusahaan bisnis melalui perluasan peluang pasar. Dengan semakin baiknya infrastruktur, maka akses dan proses pendistribusian barang maupun jasa di bidang pendidikan dan kesehatan akan semakin mudah sehingga dapat meningkatkan mutu sumber daya manusia yang berujung pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia.

#### **B. Penelitian Terdahulu**

Penelitian Ginting (2008) menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara konsumsi rumah tangga untuk makanan dan bukan makanan,



pengeluaran pemerintah untuk pendidikan, rasio penduduk miskin, dan krisis ekonomi terhadap pembangunan manusia di Indonesia.

Kusharjanto dan Kim (2011) menyatakan bahwa pengembangan infrastruktur secara signifikan meningkatkan pembangunan manusia. Infrastruktur listrik memiliki pengaruh yang lebih baik daripada infrastruktur lain seperti air, jalan, dan jumlah kelas per siswa. Untuk setiap kenaikan 1% proporsi dari listrik rumah tangga akan menaikkan IPM sebanyak 0,2%.

Menurut Usaliadanti (2011), jumlah penduduk miskin, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan secara signifikan berpengaruh terhadap IPM, sedangkan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan tidak berpengaruh terhadap pembangunan manusia.

Menurut Mauriza, dkk (2012) dengan menggunakan metode analisis deskriptif dan kuantitatif diperoleh hasil belanja pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM meskipun pengaruhnya kecil terhadap IPM di Propinsi Aceh. Hal ini menandakan bahwa belanja untuk bidang tersebut kurang optimal baik dari penggunaannya dan alokasinya.

Winarti (2014) menunjukkan bahwa kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM di Indonesia yang menandakan bahwa semakin turun tingkat kemiskinan maka IPM akan meningkat. Produk Domestik Bruto (PDB) berpengaruh positif signifikan terhadap IPM di Indonesia yang berarti kenaikan PDB akan meningkatkan IPM. Sementara itu, variabel anggaran pendidikan tidak berpengaruh signifikan dikarenakan alokasi pengeluaran

pemerintah sebesar 20% tidak dialokasikan semuanya untuk biaya pendidikan tetapi juga untuk gaji pegawai dan biaya pendidikan lainnya sehingga peningkatan anggaran pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM.

Ilhami (2014) menunjukkan bahwa anggaran pendidikan berpengaruh langsung terhadap IPM pada *lag* 1 tahun, 2 tahun, dan 3 tahun. Di antara ketiga *lag* tersebut, pengaruh pada *lag* 2 tahun lebih besar daripada *lag* lainnya. Ilhami menyarankan bahwa untuk meningkatkan IPM suatu daerah diperlukan peningkatan anggaran pendidikan yang digunakan pada program-program yang dapat meningkatkan rata-rata lama sekolah.

Habeahan (2015) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh belanja pemerintah daerah pada bidang pendidikan dan kesehatan serta pertumbuhan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hasil uji statistik dari regresi berganda dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa belanja pemerintah bidang pendidikan tidak berpengaruh terhadap IPM.

Sanggalorang (2015) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh belanja pemerintah daerah di bidang pendidikan dan kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Utara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa belanja pemerintah di bidang pendidikan memiliki pengaruh positif dan secara statistik signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, sementara variabel belanja pemerintah di bidang kesehatan secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Utara.

Sapkota (2015) menyatakan bahwa variabel infrastruktur berupa akses listrik dan air memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pendidikan dan kesehatan. Selain itu, kepadatan jalan juga signifikan dalam menaikkan indeks pendapatan. Hasil ini secara jelas mengindikasikan kepentingan variabel infrastruktur terhadap proses pembangunan manusia.

Arifin dkk (2015) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dan pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM Jawa Timur tahun 2006-2013, sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM Jawa Timur tahun 2006-2013.

Aini, dkk (2016) menyatakan bahwa variabel pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan dapat berpengaruh terhadap IPM dalam jangka panjang. Hasil penelitian menunjukkan pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan sementara pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan memiliki pengaruh positif dan signifikan.

### **C. Hipotesis**

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis membangun hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga variabel Belanja Pemerintah di Bidang Pendidikan berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kabupaten/kota Provinsi Bengkulu tahun 2010-2014.

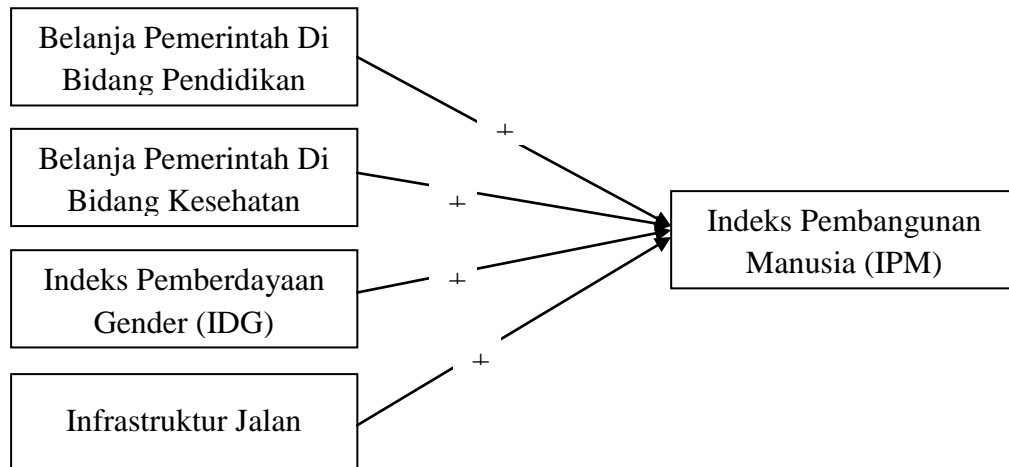
2. Diduga variabel Belanja Pemerintah di Bidang Kesehatan berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kabupaten/kota Provinsi Bengkulu tahun 2010-2014.
3. Diduga variabel Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kabupaten/kota Provinsi Bengkulu tahun 2010-2014.
4. Diduga variabel Infrastruktur Jalan berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kabupaten/kota Provinsi Bengkulu tahun 2010-2014.
5. Secara bersama-sama Belanja Pemerintah di Bidang Pendidikan, Belanja Pemerintah di Bidang Kesehatan, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), dan Infrastruktur Jalan berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kabupaten/ kota Provinsi Bengkulu tahun 2010-2014.

#### **D. Model Penelitian**

Pada pembahasan ini penulis akan memaparkan model penelitian yang menjadi dasar sekaligus alur berpikir dalam melihat pengaruh variabel penentu Indeks Pembangunan Manusia. Selanjutnya, informasi mengenai model penelitian dapat dilihat pada berikut:

**GAMBAR 2.2**

Skema Model Penelitian



Dari gambar di atas, penulis ingin mengkaji apakah belanja pemerintah di bidang pendidikan, belanja pemerintah di bidang kesehatan, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), dan infrastruktur jalan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Untuk pengujian ini akan digunakan analisis data panel.